RUMAH POTONG HEWAN

2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 7, LD 2019/NO. 125, TLD NO. 56, 31 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK

- Dalam rangka menjalankan kegiatan pemotongan hewan yang mempunyai resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit yang ditularkan melalui daging yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Serta untuk menjamin kualitas hasil pemotongan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar tradisional dan pasar modern perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemotongan hewan.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan No. 41 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PERMENTAN No. 13/Permentan/OT.140/1/2010; PERMENTAN No. 114/Permentan/PD.410/9/2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang kegiatan pemotongan hewan yang memiliki resiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan sehingga perlu disediakan fasilitas dan layanan pemotongan hewan berupa rumah potong hewan (RPH) dan/atau unit penanganan daging (UPD). Ruang lingkup perda ini meliputi RPH, UPD, pemotongan hewan, persyaratan *hygiene* dan sanitasi, sumber daya manusia, izin mendirikan RPH dan/atau UPD, izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging hewan, pelayanan teknis, serta pemotongan hewan di luar RPH. Selain itu diatur juga mengenai pengawasan, pembinaan, penyidikan, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada 24 September 2019.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemotongan hewan untuk upacara adat, penagwasan, pembinaan, dan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
- Lamp: 10 hlm.